

Kata Pengantar

Administrasi pembangunan lahir sebagai pemikiran sempalan ilmu administrasi negara setengah dasa warsa lalu. Suatu pemikiran mengenai pembangunan agar dapat lebih efektif melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan dan program – program bagi pencapaian tujuan pembangunan. Selama masa tersebut, sudah berkembang berbagai alur pemikiran bahkan paradigma dalam administrasi pembangunan.

Dalam pembangunan suatu negeri, pembangunan nasional meliputi berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, yang pada hakikatnya adalah hasil kegiatan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, administrasi pembangunan terutama dalam studi kebijaksanaan, memanfaatkan berbagai bidang ilmu yang lain, misalnya ilmu ekonomi dalam *leveraging change through the market* (mendorong perubahan melalui pemanfaatan mekanisme pasar) dan ilmu sosiologi dalam *empowering the poor* (pemberdayaan yang kurang berdaya).

Dengan demikian, administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan social ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijaksanaan – kebijaksanaan dan program – program pembangunan (ke arah modernisasi,

www.ginandjar.com

pembangunan bangsa atau pembangunan social ekonomi), dan melaksanakannya secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin.

Oleh karena itu, administrasi pembangunan adalah suatu ilmu dan studi yang aplikatif dan relevan dalam upaya pembangunan. Pada umumnya, dan anehnya, digeluti dengan lebih berhasil oleh mereka yang berlatar belakang bukan administrasi negara. Mereka yang berlatar belakang ekonomi, tehnik, social-politik melengkapi diri dengan administrasi dan jadilah mereka ahli administrasi pembangunan.

Dengan dasar pemikiran ini, saya merasa terhormat dapat memberi kata pengantar pada buku Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita. Ini adalah contoh nyata dari seorang yang berlatar belakang tehnik, mempelajari administrasi, kemudian memilih secara sadar dan berhasil dalam praktik kehidupannya dan dalam pengembangan ilmunya: administrasi pembangunan, yakni sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN) dan Guru Besar ilmu administrasi pembangunan.

Tantangan – tantangan pembangunan di Indonesia sangat kompleks, demikian pula masalah – masalah administrasi dan manajemen pembangunan, terutama dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) yang merupakan masa kebangkitan nasional kedua bagi bangsa Indonesia dalam memasuki proses tinggal landas bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang maju, adil, makmur, dan mandiri dalam negara kesatuan Republik Indonesia (RI) berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar (UUD) 1945.

Kesemua itu memerlukan upaya yang sungguh – sungguh dan didukung oleh tenaga – tenaga professional yang dapat dan mampu merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijaksanaan dan program – program pembangunan dengan memperhitungkan keadaan dan perkembangan lingkungan baik internal maupun global.

Keadaan dan perkembangan lingkungan tersebut mengandung berbagai tantangan pembangunan yang saling terkait dan mempengaruhi, misalnya pendapatan per kapita Indonesia yang masih rendah terkait dengan perlunya upaya peningkatan laju pertumbuhan yang cukup tinggi dan penciptaan lapangan kerja. Sehingga dapat menampung jumlah angkatan kerja yang cukup besar, sekaligus mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan social ekonomi.

Tantangan besar lainnya adalah mengurangi laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan pembangunan antar wilayah, pengembangan secara konsisten pembangunan berwawasan lingkungan, serta memelihara dan mengembangkan pranata social dan budaya Indonesia agar mampu mengantisipasi dampak pertumbuhan ekonomi yang cepat dan arus globalisasi yang kuat.

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan kebijaksanaan pembangunan yang mantap diberbagai sector kehidupan, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga tahap penilaiannya. Kesemua itu tidak terlepas dari kemampuan administrasi negara / pembangunan dalam melakukan dan memelopori berbagai terobosan dan pembaharuan.

Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I), administrasi negara kita telah memberikan kontribusinya yang besar dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Namun demikian, tidak berarti administrasi negara / pembangunan kita tidak memerlukan penyempurnaan dalam menghadapi tantangan pembangunan dalam kurun waktu PJP II. Oleh karena itu, seiring dengan tantangan – tantangan di bidang lainnya, tantangan yang dihadapi di bidang administrasi negara / pembangunan, antara lain :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan aparatur agar dapat memiliki kemampuan professional dan mampu berperan sebagai abdi negara dan masyarakat. Peningkatan kualitas ini harus pula ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan manusia.
- b. Mengurangi penyalahgunaan kewenangan yang antara lain berdampak merugikan masyarakat, korupsi, ekonomi biaya tinggi, dan sebagainya.
- c. Mengembangkan keterbukaan (transparency) dan bertanggungjawab (accountability) dalam birokrasi pemerintahan.
- d. Pembaharuan administrasi negara yang mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaannya, yang antara lain didasarkan pada tiga unsure pokok saling terkait yaitu desentralisasi, restrukturisasi (penataan kelembagaan organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dan

hubungan antar instansi), dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan pembangunan dan dalam pelaksanaan berbagai program / proyek pembangunan.

- e. Mengembangkan administrasi pemerintahan yang lebih tanggap terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat / pembangunan, serta perkembangan internasional.

Bagi negara – negara berkembang, penyempurnaan / pembaharuan administrasi negara dilakukan dengan menggunakan pendekatan administrasi pembangunan pada seluruh aspek administrasi negara, yaitu aspek kelembagaan, ketatalaksanaan atau manajemen, dan sumber daya manusianya. Oleh karena administrasi negara merupakan bagian dari system social masyarakat, maka keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan secara aktif dan konstruktif.

Buku ini menggambarkan hal – hal tersebut diatas dengan uraian yang padat, jelas dan dengan bahasa yang menarik serta mudah dimengerti.

Uraian diawali dengan penggolongan administrasi negara yang merupakan bagian dari administrasi. Selanjutnya diuraikan mengenai pengertian pembangunan. Dijelaskan bahwa pembangunan tidaklah identik dengan modernisasi, dan modernisasi tidak sama dengan industrialisasi. Pembangunan menyangkut perubahan lebih luas dari itu. Penjelasan konsep – konsep pembangunan dalam buku ini dimulai dengan uraian mengenai teori pertumbuhan ekonomi, yang dipaparkan secara menarik dan lengkap. Diawali dengan teori division of labor dari Adam Smith, Ricardo, dan Malthus, Harrod-Domar, teori pertumbuhan neo-klasik sampai teori pertumbuhan engogenous. Diuraikan pula tentang teori pertumbuhan yang mengasumsikan bahwa hasil pertumbuhan akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenyataannya, pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa tidak selamanya hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga timbul berbagai pemikiran baru yang antara lain disebut sebagai paradigma pembangunan social yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan. Dalam hubungan ini pertumbuhan tetap penting, sehingga diupayakan untuk memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan. Ide dasarnya adalah pemerintah harus dapat mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga produsen yang berpendapatan rendah dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan secara bersamaan menerima sumber ekonomi yang diperlukan.

Dalam pembahasan mengenai paradigma yang mencari jalan ke arah pembangunan yang berkeadilan, diketengahkan pula teori pembangunan yang berpusat pada rakyat. Paradigma ini dan paradigma pembangunan social

lainnya tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan manusia. Diingatka juga bahwa belum ada satu pun pendekatan yang dpaat memberikan jawaban yang memuaskan bagi semua orang. Masing – masing mempunyai kekuatan dan kelemahan. Pendekatan yang terbaik adalah pendekatan yang diseuaikan pada kebutuhan, kondisi dan tingkat perkembangan masing – masing negara.

Dalam buku ini, sisi – sisi penting administrasi pembangunan lainnya, seperti etika birokrasi dan dimensi spasial, diungkapkan secara khusus dengan jelas. Buku ini juga menguraikan dengan padat dan menarik fungsi – fungsi suatu system administrasi pemerintahan yang pokok seperti perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja serta pengawasan pelaksanaan dari berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan di Indonesia selama PJP I dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita ini merupakan salah satu penerbitan penting di tengah langkanya penerbitan buku – buku baru mengenai administrasi pembangunan dan praktiknya di Indonesia. Buku ini tidak saja menguraikan secara jelas historical perspective berbagai aspek administrasi

pembangunan dan praktiknya di Indoneisa, tetapi juga merefleksikan key reforms yang diperlukan bagi the ways of governing yang berkembang dan dapat berbeda sekarang dengan di masa datang.

Meskipun oleh penulisnya dinyatakan bahwa buku ini lebih sebagai materi panduan untuk mahasiswa S-1 pada Fakultas Ilmu Administrasi, namun dengan menyajikan berbagai konsep – konsep pembangunan dan aspek – aspek lain di bidang administrasi pembangunan, dari buku ini ternyata jelas alur pembahasan teoritik yang dijabarkan dalam alur pembahasan praktik administrasi pembangunan di Indonesia, sehingga dapat bermanfaat bagi mereka yang secara langsung ingin menambah wawasan dan melihat relevansi administrasi pembangunan bagi pembangunan Indonesia.

Jakarta, Nopember 1996

Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo